FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Maulidiyah, I .H.¹ M. Wahyudi ¹

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The role of government on development is really needed; APBN (budget income of state) is one of fiscal policy to create the aim of development. The arrangement of APBN needs to concern the influence factors, namely a rate of exchange rupiah to US dollar, economic development, and fuel price in world market, national inflation level, and crude oil production per day. To find out the influence of each variable, it needs to regress the existent variable, after that to find out validity of the influence is by examining statistic criteria and estimating the deviation of classic assumption. The result of the estimation does not show any serious deviation classic assumption that is able to hamper the estimation, and from the result examination it finds out that the statistic criteria does not has problem.

Keywords: fiscal policy, oil price, exchange rate, inflation, APBN

LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini hampir setiap pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi nasional. Campur tangan pemerintah memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk membiayai kegiatannya, karena membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihadapkan pada kondisi yang sulit dan dilematis. Di satu sisi seiring dengan kompleknya kadar permasalahan yang dihadapi masyarakat peranan kebijakan fiskal yang lebih besar justru dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas guna mempercepat usaha pembangunan perekonomian nasional. Di sisi lain APBN dihadapkan pada suatu kondisi ekonomi yang sulit, berkaitan dengan keterbatasan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan. Dengan demikian pemerintah menghadapi permasalahan perekonomian yang komplek dan harus diselesaikan dengan anggaran yang terbatas.

APBN juga dihadapkan pada tantangan yang berat baik pada posisi penerimaan maupun pengeluaran, dan pembiayaan anggaran. Namun APBN justru diharapkan mampu berperan dalam menciptakan stimulasi fiskal bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat. Ini berarti diperlukan pengeluaran pemerintah yang cukup besar untuk penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan produktif, pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengadaan subsidi bagi beberapa jenis komoditi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

APBN mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga dalam penyusunan APBN harus secara realistis agar dapat memberi gambaran secara tepat, jelas, dan transparan mengenai arah, sasaran, serta strategi kebijaksaaan fiskal jangka menengah maupun sebagai bagian dari integral kebijaksanaan makro ekonomi jangka pendek dan jangka menengah dalam mendukung program pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu dalam perencanaan APBN, besar-besaran penerimaan dan pengeluaran negara dalam APBN harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan serealistis mungkin. Beberapa faktor penting yang menentukan besaran-besaran tersebut antara lain kondisi terakhir perekonomian nasional (laju pertumbuhan ekonomi), harga minyak di pasaran dunia, nilai kurs, produksi minyak mentah perhari, dan inflasi.

PERUMUSAN MASALAH

Campur tangan pemerintah di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. Dalam campur tangan ini pemerintah membutuhkan biaya untuk mencapai tujuannya dan kebutuhan pembiayaan ini akan nampak pada APBN. Untuk itu dalam penyusunan APBN perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat inflasi nasional, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, produksi minyak per hari, harga minyak di pasaran dunia, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya perlu diteliti apakah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, produksi minyak per hari, dan harga minyak mentah di pasaran dunia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TUJUAN PENELITIAN

Melalui proses analisis regresi dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), penelitian ini mengamati besarnya pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga minyak di pasaran dunia, produksi minyak perhari, dan nilai tukar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TINJAUAN PUSTAKA

• Pengertian Anggaran

Definisi anggaran menurut Ilyas (1989), Anggaran dapat dirumuskan sebagai suatu rencana keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan juga melakukan pengawasan. Anggaran juga memuat data-data keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dari tahun yang lampau sebagai dasar dalam pemikiran penerimaan dan pengeluaran tahun yang sedang berlaku.

Sedang pengertian anggaran menurut Newman (1968), adalah suatu rencana keuangan dari suatu periode tertentu yang termasuk di dalamnya usulan-usulan mengenai keuangan negara kepada badan legislatif untuk diadakan persetujuan. Dalam hal ini anggaran bukan saja memuat angka-angka tetapi juga meliputi bermacam-macam garis besar pekerjaan yang akan dilakukan demi tercapainya kemakmuran negara.

Setelah kita mengkaji dan memahami dari beberapa definisi tentang anggran di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa Anggaran merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan demi terlaksananya tujuan yang dikehendaki, perkiraan perkiraan dari rencana pengeluaran dan cara-cara dalam pelaksanaannya, serta

penyusunan APBN perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat inflasi nasional, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, produksi minyak per hari, harga minyak di pasaran dunia, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya perlu diteliti apakah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, produksi minyak per hari, dan harga minyak mentah di pasaran dunia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TUJUAN PENELITIAN

Melalui proses analisis regresi dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), penelitian ini mengamati besarnya pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga minyak di pasaran dunia, produksi minyak perhari, dan nilai tukar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TINJAUAN PUSTAKA

• Pengertian Anggaran

Definisi anggaran menurut Ilyas (1989), Anggaran dapat dirumuskan sebagai suatu rencana keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan juga melakukan pengawasan. Anggaran juga memuat data-data keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dari tahun yang lampau sebagai dasar dalam pemikiran penerimaan dan pengeluaran tahun yang sedang berlaku.

Sedang pengertian anggaran menurut Newman (1968), adalah suatu rencana keuangan dari suatu periode tertentu yang termasuk di dalamnya usulan-usulan mengenai keuangan negara kepada badan legislatif untuk diadakan persetujuan. Dalam hal ini anggaran bukan saja memuat angka-angka tetapi juga meliputi bermacam-macam garis besar pekerjaan yang akan dilakukan demi tercapainya kemakmuran negara.

Setelah kita mengkaji dan memahami dari beberapa definisi tentang anggran di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa Anggaran merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan demi terlaksananya tujuan yang dikehendaki, perkiraan perkiraan dari rencana pengeluaran dan cara-cara dalam pelaksanaannya, serta

perkiraan-perkiraan sumber penerimaan yang diperoleh dalam mendukung rencana tersebut.

• Pengeluaran Pemerintah

Yaitu Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengeluaran. (Ichwan, 1989)

Dalam APBN pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pengeluaran Rutin

Adalah belanja pemerintah untuk menunjang tugas-tugas rutin yang sifatnya habis pakai (konsumtif dan noninvestasi belanja rutin sesuai dengan keputusan presiden RI Nomer 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan APBN pasal 2 ayat 2b) terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Pemeliharaan
- d. Belanja Perjalanan
- e. Susidi dan Bantuan

2. Pengeluaran Pembangunan

Adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif berbentuk investasi (proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun non fisik.Belanja pembangunan sesuai dengan pasal 2 ayat 2c Keputusan Presiden tahun 1984 tentang pelaksanaan APBN intinya adalah diperinci kedalam sektor-sektor, kemudian tiap-tiap sektor diperinci kedalam sub sektor, masing-masing sub sektor diperinci kedalam program-program, masing- masing program diperinci kedalam proyek-proyek, dan masing-masing proyek diperinci dalam bagian anggaran.

• Faktor Faktor Yang Menyebabkan Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ketahun. Menurut Sadono Sukirno (1984), besarnya pengeluaran pemerintah tergantung beberapa faktor yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat sosial dan politis antara lain:

- 1. Faktor-faktor yang besifat ekonomis yaitu berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan cepat. Pengeluaran ini diharapkan akan menimbulkan kegairahan dari berbagai pihak terutama swasta, supaya dapat berusaha lebih giat dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tadinya menganggur, sehingga laju pertumbuhan ekonomi lebih meningkat
- 2. Faktor-faktor yang bersifat sosial politik merupakan faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, seperti pemperkuat pertahanan dan keamanan, bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lain-lain.

• Dampak Pengeluaran Pemerintah Dalam Perekonomian

Kebijaksanaan pengeluaran pemerintah akan mempunyai implikasi terhadap kegiatan perekonomian dan memberi insentif pada bidang lainya, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan menambah pendapatan, diharapkan dari pengeluaran-pengeluaran pemerintah ini akan membawa dampak yang positif di dalam perekonomian secara menyeluruh.

Ada beberapa sarjana yang memberikan klasifikasi mengenai akibat pengeluaran pemerintah yaitu:

Sahni (1972), menyatakan dalam melaksanakan pengeluaran pemerintah, pemerintah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada agar tercapai efisiensi di dalam perekonomian. Dalam perencanaan pengeluaran anggaran dilakukan sedemikian rupa, sehingga tercapainya hasil yang diharapkan serta adanya kejelasan kebijaksanaan terhadap hal-hal yang akan dicapai di masa mendatang.

Sedangkan John Doe (1968), dan Larasati (1986), menerangkan pengaruh dari pengeluaran pemerintah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Stabilitas Ekonomi

Kebijaksanaan stabilitas ekonomi erat hubungannya dengan kebijaksanaan fiskal dan moneter. Kebijaksanaan stabilitas ekonomi banyak digunakan oleh pemerintah sekarang terutama dalam hubungannya dengan pajak, bermacam-macam pengeluaran peme-

rintah serta masalah transfer tetapi yang lebih banyak menyangkut masalah moneter dan tingkat bunga.

Menurut Devie (1972), kebijaksanaan stabilitas secara tidak langsung mempengaruhi kemakmuran individu, hal ini sama pula dengan kebijaksanaan alokasi dan distribusi. Apabila seseorang sudah merasa mendapat manfaat dari kebijaksanaan distribusi dan alokasi, maka secara tidak langsung stabilisasi ekonomi dampak dilaksanakan.

2. Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Kenaikan dalam pengeluaran pemerintah mempengaruhi permintaan hasil produksi dan terjadinya perubahan dalam jumlah maupun kualitas terhadap layanan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi. Di negara-negara sedang berkembang sebagian besar pengeluaran pemerintah ditujukan untuk *public investment* dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara keseluruhan di mana terjadinya pertumbuhan yang cepat dan semakin besar. Pembangunan yang terjadi akibat pengeluaran pemerintah memang banyak sekali sehingga hubungan antara satu faktor dengan yang lainnya kadang-kadang tidak nampak jelas karena saling kait mengkait antar faktor tersebut.

• Penerimaan pemerintah

Dalam rangka melaksanakan tugas, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai tugasnya, sumber penerimaan pemerintah tersebut diperoleh dari berbagai bidang yang digunakan untuk berbagai tujuan guna mencapai sasaran .

Di sisi penerimaan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi akan berpengaruh positif terhadap sasaran penerimaan pajak terutama pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah serta penerimaan cukai. Sementara itu nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap sasaran penerimaan minyak bumi, penerimaan bea masuk dan penerimaan luar negeri dan parameter kebijakan lain yang akan mempengaruhi sasaran penerimaan negara adalah kebijakan perubahan tarif pungutan ekspor atas Crude Palm Oil (CPO) dan pada produk-produk turunannya yang akan mempunyai dampak negatif terhadap penerimaan APBN (Departemen Keuangan, 1999: 26-27).

Secara garis besar sumber-sumber tersebut dapat dibagi dua, yaitu dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Selain itu pemerintah juga memasukkan komponen utang luar negeri ke dalam item penerimaan pemerintah di bawah pos penerimaan pembangunan, terhadap hal ini banyak pengamat ekonomi yang keberatan dan menyebutkan bahwa sebenarnya hutang luar negeri tidak dapat dipandang sacara murni sabagai penerimaan pemerintah.

Penerimaan dari dalam negeri bersumber dari dalam negeri sebagian besar diperoleh dari pajak yang komposisinya mengalami fluktuasi. Pada tahun anggaran 1969/1970 penerimaan pajak didominasi oleh pajak tidak langsung. Pada awal Orde baru penerimaan pemerintah tidak hanya berasal dari pajak tidak langsung namun juga dari pajak perdagangan luar negeri.

Dalam item pajak langsung penerimaan pemerintah yang terbesardari dua jenis pajak yaitu pajak perseroan minyak dan MPO. Pada awal pembangunan (1969) penerimaan minyak dan MPO terbukti dapat dihandalkan, namun sejak tahun 1980-an penerimaan minyakdan MPO tidak lagi dapat dihandalkan karena tingginya ketidak pastian harga minyak di pasar internasional.

Pemerintah telah berkali-kali menghadapi kenyataan yang pahit dengan merosotnya harga minyak yang menyulitkan pelaksanaan APBN. Pada tahun 1986 harga minyak merosot tajam sampai di bawah US\$ 10 per barel, pada hal asumsi yang dipakai dalam penyusunan RAPBN adalah US4 28 per barel.

Dari pengalaman ini dapat disimpulkan betapa berbahayanya sebuah perekonomian nasional menggantungkan APBN-nya pada penerimaan minyak dan utang luar negeri. Sebagai alternatifnya pemerintah harus lebih menghandalkan penerimaan dari dalam negeri yaitu dari sektor pajak, karena lebih dapat dihandalkan stabilitasnya. Pos ini harus dioptimalkan tidak saja bagi pembiayaan aktivitas pemerintah (pengerluaran rutin dan pembangunan) namun juga untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri.

Studi Empiris

Pengamatan yang dilakukan Suparmoko bahwa selama Pelita I, II, dan III penerimaan APBN yang berasal dari minyak bumi menjadi sangat dominan yaitu pada Pelita I sebesar 37% meningkat pada pelita

II menjadi 55.1 % dan 64,2% pada pelita III. Dengan adanya kegoncangan pasar minyak internasional dibarengi dengan resesi, kemudian dalam APBN tahun 1984/1985 penerimaan dalam negeri dengan tegas dibedakan menjadi penerimaan dari minyak dan penerimaan nonminyak guna mengantisipasi kegoncangan harga minyak di pasaran internasional. Bila lebih dicermati lagi masuknya dana luar negeri yang berbentuk bantuan luar negeri dan penerimaan minyak yang begitu besar dalan APBN yang kemudian dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan akan bersifat inflatoir.

Sedang pengamatan yang dilakukan oleh Pande Radja Silalahi Bahwa APBN tahun 2000 tidak mempunyai daya stimulasi yang besar terhadap perekonomian dengan defisit anggaran sebesar 5% dari PDB. APBN tahun 2000 memang bersifat ekspansif. Namun karena multiplier efek pengeluaran lebih kecil maka secara keseluruhan daya gerak APBN ini pada pertumbuhan yang tidak terlalu besar.

Masalah yang memperkecil kemungkinan pemerintah mencapai sasaran optimal dalam pelaksanaan APBN karena pemerintah terlalu kompromistik dalam penyusunan APBN. Dengan keadaan yang demikian maka pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk dapat meraih hasil yang opimal dalam pelaksanaan APBN 2000.

PDB Indonesia atas harga berlaku pada tahun 1986 di sumbang dari sektor minyak dan gas hanya 15 %, dengan keadaan yang demikian jelas bahwa sektor minyak dan gas sudah tidak dapat menjadi sektor andalan. Dalam perekonomian Indonesia karena peranannya dalam PDB hanya sekitar 14,7% pada tahun 1986 ini jauh lebih rendah apabila dibanding pada tahun 1980 dan 1981 yaitu sekitar 24 %. Meskipun peranan minyak dan gas menurun tetapi harus kita ingat bahwa minyak dan gas memainkan peranan yang sangat penting sebagi sumber penerimaan. (Ichimura, 1989:15).

Dan menurut Arsjad Anwar berdasarkan perkiraan sampai dengan akhir tri wulan tahun anggaran 1986/1987 penerimaan pemerintah dari sektor migas mencapai 5,3 trilyun atau 54% dari nilai yang di anggarkan untuk seluruh tahun fiskal. Kecilnya penerimaan ini dipengaruhi penurunan harga minyak yang cukup tajam, terutama sejak Februari 1986, pada hal APBN tahun 1986/1987 masih mengunakan estimasi harga minyak yang tinggi yaitu \$ 24 per barel.

Dengan harga minyak \$ 25 per barel nota keuangan tahun1986/1987 tidak akan ada penerimaan dari laba bersih minyak, ini banyak dipengaruhi penurunan harga minyak yang terus merosot tajam jauh di bawah dugaan dalam APBN tahun tersebut. Lain halnya dalam tahun anggaran 1987/1988 lonjakan harga minyak telah terjadi di awal tahun anggaran, tingkat harga yang tinggi diduga akan terus berlangsung sehingga cukup wajar bila secara rata rata harga minyak yang dicapai untuk APBN tahun 1987/1988 sekitar \$17-\$18 per barel. Penerimaan migas dalam APBN tahun 1987/1988 masih lebih dari 40 % total penerimaan dalam negeri, selama tiga triwulan sampai desember 1987 sudah mencapai 7,08 Trilyun. Pada tahun 1987/1988 terjadi kenaikan harga minyak, kenaikan kuota produksi dan nilai tukar merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dalam negeri. (Anwar dan Iwan, 1987: 6-16)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data tingkat inflasi nasional, data harga minyak bumi di pasaran dunia, data produksi minyak mentah per hari, data pertumbuhan ekonomi, dan data kurs nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta data Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 1969-2000 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan studi kepustakaan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen dilakukan dengan analisa regresi, dan untuk mengetahui validitas pengaruh akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik dan pengujian kriteria statistik.

• Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Metode OLS akan menghasilkan nilai parameter yang sahih apabila memenuhi asumsi tidak terdapat multikoliniaritas, tidak terdapat Heteroskedastisitas dan tidak terdapat Autokorelasi. Multikoliniaritas akan muncul bila tedapat hubungan linier yang sempurna atau salah satu variabel independen yang digunakan merupakan fungsi dari variabel independen lainnya. Untuk melacak keberadaan multikolinieritas dalam model akan dilakuan dengan menggunakan pengujian Klien yaitu membandingakan antara R^2 dengan Ri^2 . Jika $R^2 > Ri^2$ maka tidak terdapat multikoliniaritas dalam

model, dan jika R² < Ri² maka terdapat multikoliniaritas dalam model. Heteroskedastisitas muncul apabila salah satu variabel independen yang digunakan memiliki korelasi rank spearman yang tinggi dengan nilai mutlak residual. Menurut Young nilai korelasi yang tinggi apabila lebih dari 0,7, dan menurut Gujarati heteroskedastisitas akan muncul apabila terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dengan nilai mutlak residual. Autokorelasi muncul apabila kesalahan pengganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Untuk mengetahui keberadaan autokorelasi akan dilakukan pengujian Durbin Watson.

• Pengujian Kriteria Statistik

Dalam pengujian kriteria statistik meliputi pengujian ketepatan model, pengujian Pengaruh secara simultan dari semua variabel yang digunakan terhadap variabel dependen (Uji F) dan pengujian secara parsial dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen (Uji t). Tujuan dilakukannya pengujian ketepatan model untuk mengetahui apakah model yang digunakan merupakan estimator yang tepat dari fungsi APBN dan untuk mengetahui daya ramal dari model penduga.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Seperti telah disebutkan di dalam bab estimasi parameter model penduga dilakukan dengan mengunakan perhitungan analisis regresi linier metode OLS (Ordinary Least Square). Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai koefisien masing-masing variabel adalah:

APBN =
$$2694,897 + 40092,021$$
 PMinyak - $1031,167$ HMinyak - $2204,284$ Inf -1913,044 Pertumb + 21,181 Kurs + Ui

$$R^{2} = 0,924 \qquad F = 60,632 \qquad n = 32$$

$$DW = 1,467 \qquad \text{sig} = 0,000$$

Secara teoritis metode OLS akan menghasilkan estimasi nilai parameter model penduga yang sahih bila dipenuhi uji asumsi klasik dan uji kriteria statistik. Adapun uji asumsi klasik meliputi pelacakan multikoliniaritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi dan uji kriteria statistik meiputi uji F, Uji T dan Uji R²

Uji Validitas Asumsi Klasik

Kriteria validitas asumsi klasik digunakan untuk melihat apabila di dalam model tersebut terdapat suatu penyimpangan asumsi klasik. Untuk itu diadakan pelacakan *Multikoliniaritas*, *Heteroskedastisitas*, dan *Autokorelasi*

a. Multikoliniaritas

Masalah Multikoliniaritas muncul jika terdapat hubungan linier yang "sempurna" antara beberapa atau semua variabel independent dalam model pendugaan atau dengan kata lain suatu variabel independent merupakan fungsi dari variabel independent. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikoliniaritas adalah dengan menggunakan metode Klien, di mana langkahnya adalah menguji (merigres) terhadap masing-masing variabel independent untuk mengetahui koefisien determinasi (\mathbf{r}^2). \mathbf{r}^2 yang didapat kemudian dibandingkan dengan koefisien determinasi (\mathbf{R}^2) model penuh. Hasil regresi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Regresi Uji Multikolinearitas 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961	.924	.909	20521.2305	1.467

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, PMINYAK, INF, PERTUMB

Tabel 2. Regresi Uii Multikolinearitas 2

Model	. R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448	.201	.078	.1731

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, INF, PERTUMB

Tabel 3. Regresi Uji Multikolinearitas 3

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440	.194	.070	8.4626

a Predictors: (Constant), KURS, PMINYAK, INF, PERTUMB

b Dependent Variable: APBN

Tabel 4. Regresi Uji Multikolinearitas 4

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750	.562	.495	11.8704

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, PMINYAK, PERTUMB

Tabel 5. Regresi Uji Multikolinearitas 5

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767	.589	.526	9.3495

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, PMINYAK, INF

Tabel 6. Regresi Uji Multikonearitas 6

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762	.580	.516	2119.8233

a Predictors: (Constant), PERTUMB, HMINYAK, PMINYAK, INF

Dari tabel-tabel di atas diketahui tidak ada Ri² (R Square) dari variabel-variabel independent yang lebih besar dari R² (R Square) model penduga. Hasil perhitungan ini menunjukkan tidak adanya gangguan multikoliniaritas yang serius dalam estimasi parameter model penduga.

b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu asumsi kritis dari model regresi linier klasik yaitu bahwa gangguan u_i mempunyai varian yang sama. Jika asumsi ini tidak dipenuhi kita mempunyai heteroskedastisitas.

Hal ini terjadi bila salah satu atau lebih variabel independent memiliki korelasi rank spearmen yang tinggi dengan nilai mutlak residual. Berdasarkan kriteria Yuong heteroskedastisitas akan muncul sebagai gangguan dalam proses estimasi para meter model apabila didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0.70 atau lebih. Untuk mengetahui masalah heteroskedastisitas dalam model penduga dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Korelasi Rank Spearman untuk uji Heteroskedastisitas

				,				
		•	PMINYAK	HMINYAK	INF	PERTUMB	KURS	ABSRES
Spearman's	¥	Correlation Coefficient	1.000	.221	.094	.096	.369	.081
Spearman's KNIIII		Sig. (2-tailed)		.225	.611	.609	.038	.664
-	P	N	32	32	32	31	32	31
	HMINYAK	Correlation Coefficient	.221	1.000	197	210	.466	468
		Sig. (2-tailed)	.225	,	.280	.256	.007	.008
		N	32	32	32	31	32	31
		Correlation Coefficient	.094	197	1.000	080	164	036
	K	Sig. (2-tailed)	.611	.280		.669	.371	.848
		N	32	32	32	31	32	31
	8	Correlation Coefficient	.096	210	080	1.000	481	.057
	PERTUMB	Sig. (2-tailed)	.609	.256	.669		.006	.760
	PEI	N	31	-31	31	31	31	31
	"	Correlation Coefficient	.369	.466	164	481	1.000	.070
	KURS	Sig. (2-tailed)	.038	.007	.371	.006		.708
		N	32	32	32	31	32	31
	Si	Correlation Coefficient	.081	468	036	.057	.070	1.000
	ABSRES	Sig. (2-tailed)	.664	.008	.848	.760	.708	
	•	N	31	31	31	31	31	31

^{*} Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Dari tabel di atas diketahui nilai koefisien korelasi *rank* spearman seluruhnya tidak ada yang lebih besar dari 0,7. Dari hasil perhitungan korelasi tersebut menujukkan tidak terdapatnya gangguan heteroskedastisitas yang serius dalam proses.

^{**} Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

c Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila kesalahan penggunaan suatu periode berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dengan dengan periode sebelumnya. Alat pengujinya adalah Durbin-Watson test (DW-test).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah *autokorelasi* terlebih dahulu ditentukan nilai kritis *du* dan *dl* berdasarkan jumlah observasi dengan banyaknya variabel *independent*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Jika DW < dl maka Ho ditolak sehingga ada masalah autokorelasi positif.
- Jika DW > 4-dl maka Ho ditolak sehingga ada masalah autokorelasi negatif.
- Jika du < DW < 4-du maka Ho diterima sehingga tidak ada masalah *autokorelasi*.
- Jika dl \leq DW \leq du atau 4-du \leq DW \leq 4-dl maka hasil pengujian yang dilakukan dinyatakan ragu-ragu

Kemudian dilakukan perhitungan besarnya DW (Durbin Watson) dan diketahui besarnya DW = 1,467 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

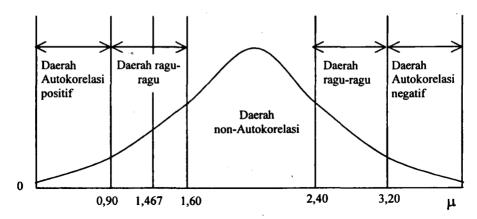
Tabel 8. Regresi Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961	.924	.909	20521.2305	1.467

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, PMINYAK, INF, PERTUMB

b Dependent Variable: APBN

Gambar 1. Daerah Kritis Autokorelasi



Dari hasil perhitungan DW-test didapatkan hasil sebesar 1,467 ini menunjukkan bahwa masalah mengenai *autokorelasi* masih diragukan sehingga proses estimasi parameter model penduga, dapat mengabaikan masalah autokorelasi.

Pengujian Kriteria Statistik

Kriteria ini meliputi perhitungan nilai Uji R² (koefisien determinasi), Uji T (uji variabel individu), Uji F (uji secara keseluruhan variabel).

a. Uji R²

R² (koefisien determinasi) digunakan untuk mengukur kebaikan dari model penduga yaitu menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel *independent* yang mempengaruhi variabel *dependent*. Untuk mengetahui daya ramal atau *goodness of fit* dari model penduga dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi R², Pada analisa data *time series*, R² dianggap baik jika mendekati 1,00. R² hasil perhitungan dapat dilihat dalam **tabel 9**.

Tabel 9. Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961	.924	.909	20521.2305	1.467

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, PMINYAK, INF, PERTUMB

b Dependent Variable: APBN

Dari hasil perhitungan analisa regresi diketahui \mathbb{R}^2 (R Square) terlihat sebesar 0.924, angka ini memperlihatkan model penduga yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya ramal yang cukup baik. Dengan melihat besarnya \mathbb{R}^2 keseluruhan variabel independent yang dimasukkan ke dalam model penduga secara simultan dapat menerangkan 92,4 % variasi dari variabel independent, dan sisanya sebesar 7,6 % dijelaskan oleh variasi dari variabel independent di luar model yang diteliti.

b. Uji T (T-test)

Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel independent lainnya konstan.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Uji T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2694.897	30809.895		.087	.931		
	PMINYAK	40092.021	23246.163	.107	1.725	.097	.799	1.252
	HMINYAK	-1031.167	475.567	133	-2.168	.040	.806	1.241
	INF	-2204.284	339.040	542	-6.502	.000	.438	2.284
	PERTUMB	-1913.044	430.455	383	-4.444	.000	.411	2.433
	KURS	21.181	1.899	.951	11.157	.000	.420	2.383

a Dependent Variable: APBN

Dari hasil perhitungan regresi diketahui besarnya signifikansi harga minyak, produksi minyak, inflasi, pertumbuhan, dan kurs mempengaruhi secara individu terhadap APBN lebih kecil dari 0,1 sehingga pada tingkat α sampai dengan10 %. Jadi harga minyak, produksi minyak, inflasi, pertumbuhan, dan kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APBN .

c. Uji F (F-test)

Untuk mengetahui apakah modal penduga yang telah dibentuk merupakan model yang tepat sebagai *estimator* dari fungsi APBN. Untuk dapat mencapai hal tersebut dengan melakukan *F test*.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127667780044.412	5	25533556008.882	60.632	.000
	Residual	10528022534.784	25	421120901.391		
	Total	138195802579.197	30			

Tabel 11, ANOVA

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi F-test sebesar nol (0) berarti terbukti bahwa model penduga merupakan estimator yang tepat bagi fungsi APBN, karena signifikansi F-test ≤ 0.01 . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model pernduga yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang tepat untuk mengestimasi fungsi APBN.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Produksi minyak dan nilai tukar (kurs) mempunyai hubungan yang positif dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kurs mempunyai hubungan yang positif berhubungan dengan pos pembiayaan yang mengandung komponen valuta asing seperti pembayaran bunga dan pokok hutang luar negeri serta untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan produksi minyak juga mempunyai hubungan yang positif berhubungan dengan pencarian

a Predictors: (Constant), KURS, HMINYAK, PMINYAK, INF, PERTUMB

b Dependent Variable: APBN

ladang minyak yang baru ini memerlukan biaya yang besar sehingga dapat meningkatkan pengeluaran APBN.

Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan harga minyak menunjukan hubungan yang negatif terhadap APBN. Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif, implikasinya pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan tersebut memerlukan dana yang dapat meningkatkan APBN. Inflasi mempunyai pengaruh negatif karena pemerintah menambah pengeluaran APBN untuk likuiditas perekonomian, sedangkan harga minyak juga mempunyai pengaruh yang negatif ini disebabkan ekspor minyak Indonesia lebih kecil dari pada impor minyaknya sehingga perlu biaya yang diambil dari APBN.

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier menunjukan ada hubungan antara Produksi Minyak, Harga Minyak, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kurs dengan APBN, adapun besarnya pengaruh tersebut adalah Produksi Minyak mempunyai pengaruh sebesar 40092,021 satuan, Harga Minyak mempunyai pengaruh sebesar -1031,167 satuan, Inflasi mempunyai pengaruh sebesar -2204,284 satuan, Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh sebesar -1913, 044 satuan, sedangkan Kurs mempunyai pengaruh sebesar 21,181 satuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. 1995. Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Doe, John., (tanpa tahun). Keuangan Negara, diterjemahkan oleh Syah, Iskandar, dkk. Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar, 1999. Ekonometrika Dasar, Jakarta:Penerbit Erlangga,
- Ichwan, Muhammad, 1989. Administrasi Keuangan Negara Suatu Pengantar Pengelolaan APBN, Yogyakarta: Liberty.
- Jarwanto, P. S. & Subagyo, Pangestu, 1993. Statistik Induktif. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1994. Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi. Jakarta: Gramedia Pustaka

- Mangkoesoebroto, Guritno, 1993. Ekonomi Publik, Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Keuangan, 2000. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000, Jakarta
- Prihadi Utomo, Yuni, 1996. Penggunaan Analisa Regresi Dalam Penelitian Ekonomi. *Empirika*, 1996 (18).
- Triyanto, Widodo, 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

7.